

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	1	9
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Kompas	Sindo	Tempo
Indopos	Pos Kota	Warta Kota

Pemprov Tak Transparan

JAKARTA - Pemprov DKI Jakarta dinilai kurang transparan soal pengajuan anggaran. Alhasil, banyak anggaran siluman yang muncul dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2020. Oleh sebab itu segera membuka akses publik ke website ebudgeting apbd.jakarta.go.id

"Lebih baik akses ke publik segera dibuka, kami sudah minta hal ini segera dibuka dari awal Oktober yang lalu, tapi Pemprov tetap bergeming untuk menutup akses publik kepada KUA-PPAS," ujar Ima Mahdiah, anggota DPRD Fraksi PDI Perjuangan kepada INDOPOS di DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2019).

Padahal, sambung Ima, semenjak 2016, Pemprov DKI sudah melakukan inisiatif untuk transparansi dengan membuka akses kepada publik mengenai rincian anggaran sejak mulai RKPD (fase 1 penyusunan anggaran), fase 2 (KUA-PPAS), sampe fase akhir (RAPBD). Jadi ini juga bisa menjadi pendidikan politik bagi masyarakat.

Selain mengenai akses yang tertutup, lan-

jutnya, PDI Perjuangan juga menyorot mengenai banyaknya anggaran yang aneh dan tidak cermat, seperti anggaran penggunaan influencer luar negeri sebesar Rp5 miliar, anggaran lem sebesar Rp82 miliar, dan juga pembuatan jalur sepeda yang tiba-tiba saja naik dari Rp4,4 miliar menjadi Rp73 miliar.

"Pak gubernur seharusnya membuka lebar-lebar akses informasi terkait KUA-PPAS, karena waktu yang semakin sempit akhir November sudah harus selesai, maka akan lebih baik jika banyak pihak yang membantu menyisir anggaran," tutur Ima.

Ditambahkan Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Golkar Basri Baco, transparansi anggaran era kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan memang minim. Berbeda dengan sebelum Anies menjabat, APBD yang dirancang maupun disahkan terpampang di setiap kantor kelurahan sehingga bisa dilihat oleh warga. "Sekarang saya sepertinya dalam dua tahun ini tidak melihat itu," ungkap dia kepada

INDOPOS saat dihubungi, Rabu (30/10/2019).

Dia mencontohkan, rancangan anggaran dahulu dipajang salah satunya di kantor Kelurahan Menteng. Dengan cara tersebut, warga dapat mengetahui dan mengawasi anggaran. "Saya rasa ini baik untuk membantu kinerja bapak ibu SKPD jadi tidak terlalu pusing mengawasi kontraktor dan lain-lain," pungkask dia. (aen)



Kami sudah minta hal ini segera dibuka dari awal Oktober yang lalu, tapi Pemprov tetap bergeming untuk menutup akses publik kepada KUA-PPAS".

Ima Mahdiah

Anggota DPRD Fraksi PDI Perjuangan